

Faktor - Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Membayar Iuran Jaminan Kesehatan Nasional oleh Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah di Kota Jakarta

Singgih Aji Pangestu¹, Sarah Geltri Harahap^{2*}, Hardin La Tamba³

^{1,2,3} Program Studi Administrasi Kesehatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Rumah Sakit Husada, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia

*Penulis Korespondensi: sarah@stikesrshusada.ac.id

Abstract. Compliance in paying contributions is an important factor in ensuring the sustainability of the National Health Insurance (JKN) program, especially in the Non-Wage Workers (PBPU) segment who make payments independently. However, the level of compliance of PBPU participants in Jakarta City is still low, as indicated by the high rate of contribution arrears and the large number of deactivated memberships. This study aims to analyze the factors that influence compliance in paying National Health Insurance (JKN) contributions in the Non-Wage Workers (PBPU) segment in Jakarta City in 2025. The research design used was quantitative with a cross-sectional approach, involving 180 respondents. Bivariate analysis using the Chi-Square test showed that there was a significant relationship between perception and compliance ($p = 0.002$), income with compliance ($p = 0.046$), and motivation with compliance ($p = 0.000$). However, there was no significant relationship between knowledge ($p = 0.291$) and sanctions ($p = 0.103$) on compliance in paying contributions. These findings indicate that psychological and economic aspects have a strong influence on driving compliance with JKN premiums. Therefore, efforts to improve compliance need to focus on enhancing positive perceptions, internal motivation, and sustainable income for participants. Perception is the most dominant factor influencing compliance among PBPU participants. Strategies to increase education and improve services are needed to boost compliance and ensure the sustainability of the JKN program.

Keywords: BPJS Kesehatan; Compliance; JKN Contributions; PBPU; Worker Participants.

Abstrak. Kepatuhan membayar iuran merupakan salah satu faktor penting dalam menjamin keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya pada segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang melakukan pembayaran secara mandiri. Namun, tingkat kepatuhan peserta PBPU di Kota Jakarta masih rendah, yang ditunjukkan dengan tingginya angka tunggakan iuran dan banyaknya kepesertaan yang dinonaktifkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) di Kota Jakarta tahun 2025. Desain penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan cross-sectional, melibatkan 180 responden. Analisis bivariat menggunakan uji Chi-Square menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi dengan kepatuhan ($p=0,002$), pendapatan dengan kepatuhan ($p=0,046$), dan motivasi dengan kepatuhan ($p=0,000$). Namun, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan ($p=0,291$) dan sanksi ($p=0,103$) terhadap kepatuhan membayar iuran. Temuan ini mengindikasikan bahwa aspek psikologis dan ekonomi memiliki pengaruh kuat dalam mendorong kepatuhan membayar iuran JKN. Upaya peningkatan kepatuhan perlu difokuskan pada peningkatan persepsi positif, motivasi internal, serta keberlanjutan pendapatan peserta. Variabel persepsi merupakan faktor yang paling dominan memengaruhi kepatuhan peserta PBPU. Diperlukan strategi peningkatan edukasi, serta upaya perbaikan pelayanan dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan menjamin keberlanjutan program JKN.

Kata Kunci: BPJS Kesehatan; Iuran JKN; Kepatuhan; PBPU; Peserta Pekerja.

1. LATAR BELAKANG

Kesehatan merupakan salah satu hak fundamental manusia yang menjadi unsur penting dalam mencapai kesejahteraan, serta harus direalisasikan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023, kesehatan diartikan sebagai kondisi ideal yang mencakup aspek fisik, mental, dan sosial, yang memungkinkan

setiap individu untuk menjalankan aktivitas sosial dan ekonomi secara maksimal (Kementerian Kesehatan RI, 2023).

Dalam rangka memperkuat pelaksanaan sistem jaminan sosial di Indonesia, pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan, antara lain Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2014, serta Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 mengenai Jaminan Kesehatan yang kemudian diperbaharui melalui Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2020. Seluruh regulasi tersebut ditujukan untuk mendukung pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan layanan Kartu Indonesia Sehat (KIS) (Alkayyis, 2024).

Jumlah penduduk Indonesia mencapai 284.438.800 jiwa. Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya jaminan kesehatan, jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga mengalami pertumbuhan yang signifikan. Tercatat, hingga Januari 2025 jumlah peserta JKN mencapai 278.467.057 orang yang setara dengan 97,90% dari populasi penduduk di Indonesia. Mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018, kepesertaan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terbagi ke dalam dua kategori utama, yaitu Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Peserta Non-Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI). Peserta PBI merupakan individu atau kelompok masyarakat yang iurannya ditanggung oleh pemerintah karena tergolong tidak mampu. Tujuan utama dari kelompok ini adalah memastikan bahwa masyarakat tidak mampu tetap memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan yang layak tanpa terbebani biaya. Sementara itu, peserta Non-PBI terdiri dari berbagai kalangan di luar kelompok PBI, yang mencakup penerima upah seperti aparatur sipil negara, pegawai swasta, aparat desa, TNI, dan POLRI. Iuran mereka biasanya di bayarkan dengan cara kolektif oleh pemberi kerja dan pemerintah. Selain itu, kelompok Non-PBI juga mencakup pekerja bukan penerima upah, seperti pekerja mandiri atau informal, yang membayar iuran secara mandiri sesuai dengan kelas layanan yang dipilih. Kelompok terakhir dalam kategori Non-PBI adalah non-pekerja, seperti veteran, janda atau duda, anak yatim, pemberi kerja, dan individu lainnya yang juga diwajibkan membayar iuran sesuai ketentuan yang berlaku (Perpres RI No. 82 Tahun 2018).

Peserta bukan penerima bantuan iuran (Non-PBI) mencakup pekerja sector informal atau pekerja bukan penerima upah, yaitu individu yang memperoleh pendapatan dari usaha atau kegiatan yang dijalankannya sendiri. Oleh karena itu, untuk menjadi peserta JKN, mereka diwajibkan membayar iuran bulanan secara mandiri. Menurut penelitian yang dilakukan

Wulandari et al (2024) mengatakan bahwa pekerja sektor informal lebih kecil kemungkinan untuk mengikuti program JKN (R. D. Wulandari et al., 2024). Di Indonesia, hingga Januari 2025, jumlah pekerja mandiri yang terdaftar sebagai peserta BPJU tercatat sebanyak 33.643.645 orang, mengalami peningkatan dibandingkan dengan jumlah pada tahun sebelumnya (BPJS Kesehatan, 2025).

Melakukan pembayaran iuran secara rutin merupakan salah satu bentuk komitmen yang harus dipenuhi oleh peserta BPJS Kesehatan. Bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), iuran ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Sedangkan untuk masyarakat yang didaftarkan sebagai peserta oleh pemerintah daerah, pembiayaan iurannya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Bagi kelompok Pekerja Penerima Upah (PPU), kewajiban membayar iuran dibagi antara pemberi kerja dan pekerja itu sendiri. Sementara itu, peserta yang tergolong Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) harus membayar iuran secara mandiri, atau dalam beberapa kasus, iuran dibayarkan oleh pihak lain yang mewakili kepentingan peserta tersebut (Perpres RI No. 82 Tahun 2018).

Jumlah iuran BPJS Kesehatan disesuaikan dengan kelas layanan yang dipilih oleh peserta. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, iuran bulanan untuk peserta kelas I ditetapkan sebesar Rp150.000 per orang, kelas II sebesar Rp100.000, dan kelas III sebesar Rp42.000 per orang. Pembayaran iuran ini harus dilakukan paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Apabila peserta menunggak selama beberapa bulan, maka status kepesertaan akan dinonaktifkan dan dianggap dalam kondisi tunggakan secara keuangan. (Peraturan Presiden, 2020)

Dalam pelaksanaan program BPJS Kesehatan, sering kali terjadi defisit anggaran. Berdasarkan data dari BPJS Kesehatan, defisit tercatat sebesar Rp9 triliun pada tahun 2023, meningkat menjadi Rp9,56 triliun pada tahun 2024. Salah satu penyebab utama defisit ini adalah rendahnya tingkat penagihan atau kolektibilitas iuran, khususnya dari peserta mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), yang menjadi satu-satunya kelompok peserta yang pembayarannya dilakukan secara mandiri. Selain itu, defisit juga dipicu oleh rendahnya tingkat kepatuhan peserta mandiri atau peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dalam membayar iuran turut memperparah kondisi keuangan BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya peningkatan disiplin dan kepatuhan dalam pembayaran iuran di kalangan peserta mandiri agar program JKN dapat terus berjalan secara berkelanjutan (Nuraeni, 2021).

Tingginya biaya layanan kesehatan serta risiko penyakit yang bisa dialami oleh siapa saja menjadi alasan utama seseorang mendaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Peserta diwajibkan membayar iuran bulanan sesuai dengan kemampuan finansial

masing-masing. Dalam pelaksanaannya, kepatuhan peserta mandiri dalam membayar iuran tepat waktu menjadi faktor krusial untuk memastikan akses yang lancar terhadap layanan kesehatan. Data dari BPJS Kesehatan menunjukkan bahwa total tunggakan iuran JKN-KIS dari peserta mandiri kelas 1, 2, dan 3 di Indonesia mencapai Rp11 triliun. Kelompok dengan tunggakan iuran tertinggi berasal dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU). Umumnya, tingkat kepatuhan dalam kelompok ini rendah karena masih banyak individu yang mengalami kesulitan ekonomi atau belum memiliki kesadaran yang cukup untuk membayar iuran secara rutin (Peraturan Presiden, 2020)

Menurut (Syahda et al., 2022) Dalam penelitiannya disebutkan bahwa terdapat empat provinsi di Indonesia dengan jumlah peserta JKN terbanyak, yaitu DKI Jakarta, Papua Barat, Aceh, dan Sulawesi Utara. Di antara keempat provinsi tersebut, DKI Jakarta mencatatkan tingkat kepesertaan tertinggi, yakni mencapai 162,09%. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menjalin kemitraan dengan BPJS Kesehatan wilayah Jakarta melalui pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan berhasil mencapai cakupan *Universal Health Coverage* (UHC) sebesar 96,56% (Sinaga et al., 2021). Hal ini di dukung dengan data yang diterbitkan oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) melalui Sistem Monitoring dan Evaluasi Jaminan Sosial (SISMONEV), cakupan kepesertaan sampai dengan Januari 2025 sebesar 187,29% (19.988.465 jiwa) (Dewan Jaminan Sosial Nasional, 2025) dari jumlah populasi 10.672.100 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2023).

Berdasarkan data kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi DKI Jakarta, terdapat variasi dalam distribusi peserta di setiap kabupaten/kota. kelompok Pekerja Penerima Upah (PPU) memiliki jumlah peserta tertinggi di setiap wilayah. Kabupaten Kepulauan Seribu didominasi oleh PBI (41,9%) dan PPU (55,9%), sedangkan Jakarta Barat memiliki PBI (15,5%), PBPU (11,5%), dan PPU (71,9%). Jakarta Pusat mencatat kepesertaan BP (0,6%), PBI (2,0%), PBPU (1,4%), dan PPU (35,7%), dengan tambahan signifikan dari PBPU yang didanai APBD (60,2%). Sementara itu, Jakarta Selatan mencatat PPU (87,0%) sebagai kelompok terbesar, diikuti oleh PBI dan PBPU masing-masing (5,3%). Jakarta Timur memiliki PPU (67,4%), PBI (16,5%), dan PBPU (12,3%), sedangkan Jakarta Utara mencatat PPU (74,5%), PBI (16,2%), dan PBPU (8,0%). Dari data ini, PPU menjadi kategori dengan kepesertaan tertinggi, disusul PBPU dan PBI yang didanai APBD hanya tercatat di Jakarta Pusat (60,2%). Jumlah peserta PBPU di Kota Jakarta sebanyak 1.114.959 (Dewan Jaminan Sosial Nasional, 2025).

Meskipun jumlah peserta BPJS Kesehatan terus meningkat, hal ini tidak sejalan dengan tingkat kepatuhan pembayaran iuran, terutama di kalangan peserta mandiri. Hal ini tercermin

dari tingginya jumlah kepesertaan yang dinonaktifkan akibat tunggakan iuran. Data dari Sistem Monitoring dan Evaluasi Jaminan Sosial (SISMONEV) yang dikelola oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menunjukkan bahwa kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) merupakan penyumbang terbesar terhadap jumlah peserta yang statusnya tidak aktif (Rosdiana et al., 2023). Pada Agustus 2024, jumlah peserta PBPU yang menunggak iuran tercatat sebanyak 14,744,028 jiwa dan angka ini meningkat pada September 2024, di mana jumlah peserta yang tidak aktif karena menunggak iuran mencapai 14,839,911 jiwa (Dewi et al., 2023). Hal inilah yang menyebabkan BPJS Kesehatan selalu mengalami defisit setiap tahunnya.

Ketidakpatuhan dalam pembayaran iuran berdampak baik bagi peserta maupun pengelola BPJS Kesehatan. Bagi peserta, konsekuensinya adalah terhambatnya akses layanan kesehatan, karena status kepesertaan akan menjadi nonaktif mulai bulan berikutnya setelah terjadi keterlambatan pembayaran. Akibatnya, penjaminan pelayanan kesehatan akan dihentikan sementara. Sementara itu, bagi pengelola BPJS Kesehatan, ketidakpatuhan ini dapat menyebabkan kerugian yang cukup besar (Sunjaya et al., 2022). Dalam penelitian yang dilakukan oleh (A. Wulandari et al., 2020) ditemukan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan peserta mandiri adalah pengetahuan, pendapatan, persepsi terhadap pelayanan kesehatan dan risiko. Selain itu, Lisnah et.al (2023), juga menunjukkan di Kota Jayapura faktor yang berpengaruh secara signifikan adalah pengetahuan, pendapatan dan motivasi peserta dalam membayar iuran JKN (Lisnah et al., 2023).

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penting untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dalam membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya di Kota Jakarta yang mayoritas pekerjaan penduduknya adalah pada sektor informal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan empiris mengenai faktor utama yang berkontribusi terhadap tingkat kepatuhan peserta PBPU, serta menjadi dasar dalam merumuskan strategi dan kebijakan yang lebih efektif bagi BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran. Dengan demikian, keberlanjutan program JKN dapat terjaga, sehingga semakin banyak masyarakat yang memperoleh manfaat dari sistem jaminan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai **"Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Membayar Iuran Jaminan Kesehatan Nasional oleh Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah di Kota Jakarta"**.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dengan menggunakan rancangan penelitian deskriptif dengan pendekatan *crosssectional*. Penelitian ini berlokasi di DKI Jakarta pada peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan kategori Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU). Range waktu penelitian dilaksanakan dari bulan April sampe Juli 2025. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta BPJS Kesehatan yang termasuk dalam kategori Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) di Kota Jakarta. Berdasarkan laporan dari Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) jumlah peserta BPJS Kesehatan kategori PBPU di Kota Jakarta berjumlah 1.114.959 jiwa. *Stratified Random Sampling* menjadi Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini. Maka dengan demikian sampel yang akan digunakan sebesar minimal 180 responden pada penelitian ini. Hal ini cukup mewakili populasi yang ada.

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengambilan data primer pada penelitian ini melalui penyebaran kuisioner. Penyebaran kuisioner dilakukan secara *online* melalui *google form* dan *offline* dengan menyebarkan lembar kuesioner secara langsung kepada responden, sedangkan Dalam penelitian ini untuk memperoleh data sekunder melalui berbagai jurnal atau buku yang berkaitan dengan factor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar iuran jaminan Kesehatan nasional (JKN) oleh peserta bukan penerima upah (PBPU). Metode penelitian ini menggunakan angket, dan observasi. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan analisis bivariat, dan Analisis multivariat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Univariat

a. Karakteristik Responden

Berdasarkan hasil mayoritas responden adalah perempuan (57,2%), sementara laki-laki berjumlah 42,8%. Dari segi usia, sebagian besar responden berada dalam rentang usia produktif, yaitu 26-45 tahun, yang mencakup 69,4% dari total responden. Pada tingkat pendidikan, mayoritas responden merupakan lulusan SMA (60,6%), diikuti oleh mereka yang memiliki tingkat pendidikan D1, D3, S1, dan S3 (20,6%). Berdasarkan jenis pekerjaan, sebagian besar responden bekerja sebagai pedagang atau wiraswasta (42,2%) serta tenaga ahli atau pekerja bebas seperti *freelancer* dan arsitek (29,4%), menunjukkan dominasi responden dari tabel informal. Sementara itu, dilihat dari jumlah anggota keluarga, sebagian besar responden berasal dari keluarga dengan 3 hingga 4 anggota (72,8%), mencerminkan struktur keluarga kecil hingga menengah.

b. Gambaran Distribusi Frekuensi Berdasarkan Kepatuhan Membayar Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Peserta PBPU di Kota Jakarta

Kepatuhan membayar iuran dikategorikan menjadi dua yaitu kategori patuh dan tidak patuh. Pendistribusiannya dapat dilihat pada tab di bawah ini.

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Kepatuhan Membayar Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Peserta PBPU di Kota Jakarta.

Kepatuhan	Frekuensi	Persentase
Patuh	127	70.6
Tidak Patuh	53	29.4
Total	180	100

Sumber : Data Primer, 2025.

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa dari total 200 responden peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) di Kota Jakarta, sebagian besar responden tergolong patuh dalam membayar iuran JKN, yaitu sebanyak 127 orang (70%). Sementara itu, terdapat 62 responden (30%) yang tidak patuh dalam melakukan pembayaran iuran secara rutin.

c. Gambaran Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pengetahuan Responden Peserta PBPU di Kota Jakarta

Pengetahuan responden dikategorikan menjadi dua, yakni kategori pengetahuan baik dan kategori pengetahuan buruk. Pendistribusiannya dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pengetahuan Responden Peserta PBPU di Kota Jakarta.

Kepatuhan	Frekuensi	Persentase
Baik	82	45,6
Kurang	98	54,4
Total	180	100

Sumber : Data Primer, 2025.

Berdasarkan tabel 2 mayoritas responden di Kota Jakarta memiliki tingkat pengetahuan yang kategori kurang, yaitu sebanyak 98 orang (54,4%). Sementara itu, responden dengan tingkat pengetahuan yang tergolong baik berjumlah 82 orang (45,6%) dari total 180 responden.

d. Gambaran Distribusi Frekuensi Berdasarkan Sanksi Responden Peserta PBPU di Kota Jakarta

Sanksi responden dikategorikan menjadi dua, yaitu sanksi positif yang artinya responden mengetahui adanya sanksi keterlambatan pembayaran, dan sanksi negatif yang

artinya responden tidak mengetahui adanya sanksi keterlambatan pembayaran. Pendistribusiannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Sanksi Responden Peserta PBPU di Kota Jakarta.

Sanksi	Frekuensi	Persentase
Positif	124	68.9
Negatif	56	31.1
Total	180	100

Sumber : Data Primer, 2025.

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa mayoritas responden di Kota Jakarta memiliki respon positif terhadap sanksi, yaitu sebanyak 124 orang (71%). Sementara itu, hanya 56 orang (31%) yang menunjukkan respon positif terhadap sanksi

- e. Gambaran Distribusi Frekuensi Berdasarkan Motivasi Responden Peserta PBPU di Kota Jakarta

Motivasi responden dikategorikan menjadi dua, yakni kategori motivasi tinggi dan motivasi rendah. Pendistribusiannya dapat dilihat pada 37ebag di bawah ini.

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Motivasi Responden Peserta PBPU di Kota Jakarta.

Motivasi	Frekuensi	Persentase
Tinggi	153	85.0
Rendah	27	15.0
Total	180	100

Sumber : Data Primer, 2025.

Berdasarkan tabel 4 diketahui bahwa Sebagian besar responden di Kota Jakarta memiliki tingkat motivasi yang tinggi, yaitu sebanyak 153 orang (85%). Sementara itu, hanya 36 orang (15%) yang memiliki motivasi rendah.

- f. Gambaran Distribusi Frekuensi Berdasarkan Persepsi Responden Peserta PBPU di Kota Jakarta

Persepsi responden dikategorikan menjadi dua yakni kategori persepsi positif dan persepsi negatife. Pendistribusiannya dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 5. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Persepsi
Responden Peserta PBPU di Kota Jakarta

Persepsi	Frekuensi	Persentase
Positif	167	92.8
Negatif	13	7.2
Total	180	100

Sumber : Data Primer, 2025.

Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat bahwa mayoritas responden di Kota Jakarta memiliki persepsi yang positif, yaitu sebanyak 167 orang (92%), dan hanya 13 responden (7.2%) yang menunjukkan persepsi negatif.

g. Gambaran Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga Responden Peserta PBPU di Kota Jakarta

Distribusi responden berdasarkan jumlah anggota keluarga yang terdaftar dan menjadi tanggungan dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 6. Distribusi Responden Berdasarkan Jumlah Anggota
Keluarga Peserta PBPU di Kota Jakarta.

Jumlah Anggota Keluarga	Frekuensi	Persentase
1 orang	1	0.6
2 orang	17	9.4
3 orang	59	32.8
4 orang	72	40.0
5 orang	24	13.3
6 orang	5	2.8
7 orang	1	0.6
9 orang	1	0.6

Sumber : Data Primer, 2025.

Berdasarkan tabel 6. dapat dilihat bahwa mayoritas responden memiliki jumlah anggota keluarga berjumlah 4 orang. Variabel jumlah anggota keluarga kemudian diaktegorikan menjadi dua yakni keluarga besar yang terdiri dari 4 anggota keluarga lebih dan keluarga kecil kurang dari 4 anggota keluarga.

h. Gambaran Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pekerjaan Responden Peserta PBPU di Kota Jakarta

Pekerjaan responden dikategorikan menjadi dua, yakni kategori bekerja yang artinya responden mempunyai pekerjaan seperti pedagang/wiraswasta, karyawan swasta, tenaga ahli pekerja bebas dan kategori tidak bekerja yang artinya responden tidak memiliki

pekerjaan dan sebagai ibu rumah tangga atau pensiunan. Pendistribusiannya dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 7. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pekerjaan Responden Peserta PBPU di Kota Jakarta.

Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
Bekerja	155	13.9
Tidak Bekerja	25	86.1
Total	180	100

Sumber : Data Primer, 2025.

Berdasarkan tabel 7 menunjukkan bahwa sebagian besar responden peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) di Kota Jakarta berada dalam kategori bekerja, yaitu sebanyak 169 orang (84,5%). Sementara itu, hanya 31 orang (15,5%) yang termasuk dalam kategori tidak bekerja.

i. Gambaran Distribusi Frekuensi Berdasarkan Tarif Iuran Responden Peserta PBPU di Kota Jakarta

Tarif iuran responden dikategorikan menjadi 2 yakni kategori tinggi apabila responden termasuk kelas I dengan iuran JKN sebesar Rp150.000 dan kelas II dengan iuran JKN sebesar Rp100.000 dan kategori rendah apabila responden termasuk kelas III dengan iuran JKN sebesar Rp35.000. Pendistribusiannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 8. Distribusi Frekuensi Berdasarkan Tarif Iuran Responden Peserta PBPU di Kota Jakarta.

Tarif Iuran	Frekuensi	Persentase
Tinggi	130	72.2
Rendah	50	27.8
Total	180	100

Sumber : Data Primer, 2025.

Berdasarkan tabel 8 sebagian besar responden peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) di Kota Jakarta tergolong dalam kategori tarif iuran tinggi, yaitu sebanyak 130 orang (72,2%). Sementara itu, 57 responden (27,8%) termasuk dalam kategori tarif iuran rendah.

Hasil Analisis Bivariat

a. Hubungan Pengetahuan dengan Tingkat Kepatuhan Membayar Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Pekerja Bukan Penerima Upah di Kota Jakarta

Berdasarkan hasil analisis, responden dengan pengetahuan yang baik memiliki tingkat

kepatuhan membayar iuran sebesar 73,2%, sedikit lebih tinggi dibandingkan responden dengan pengetahuan kurang yang memiliki tingkat kepatuhan 68,4%. Namun, perbedaan ini tidak signifikan secara statistik dengan nilai *p-value* sebesar 0,48. Nilai *Prevalence Ratio* (PR) sebesar 1,179 dengan Confidence Interval (CI) 95%: 0,744-1,869 yang mencakup angka 1, menegaskan bahwa tidak terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat pengetahuan dengan kepatuhan membayar iuran dalam studi ini.

b. Hubungan Sanksi dengan Tingkat Kepatuhan Membayar Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Pekerja Bukan Penerima Upah di Kota Jakarta

Hasil analisis menunjukkan bahwa responden yang memiliki persepsi negatif terhadap sanksi justru memiliki tingkat kepatuhan membayar iuran yang lebih tinggi (69,4%) dibandingkan mereka yang memiliki persepsi positif terhadap sanksi (73,2%). Namun demikian, perbedaan ini tidak signifikan secara statistik, dengan *p-value* sebesar 0,59. Nilai *Prevalence Ratio* (PR) sebesar 0,874 dengan Confidence Interval (CI) 95%: 0,526–1,452 yang mencakup angka 1, menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara persepsi terhadap sanksi dan kepatuhan membayar iuran.

c. Hubungan Motivasi dengan Tingkat Kepatuhan Membayar Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Pekerja Bukan Penerima Upah di Kota Jakarta

Hasil analisis menunjukkan bahwa responden dengan motivasi tinggi memiliki tingkat kepatuhan membayar iuran yang lebih tinggi (72,5%) dibandingkan dengan responden yang memiliki motivasi rendah (59,3%). Meskipun terdapat kecenderungan bahwa motivasi tinggi berhubungan dengan kepatuhan lebih baik, hasil ini belum signifikan secara statistik dengan *p-value* sebesar 0,162. Nilai *Prevalence Ratio* (PR) sebesar 1,484 dengan Confidence Interval (CI) 95%: 0,880-2,503, yang masih mencakup angka 1, mengindikasikan bahwa belum terdapat hubungan yang bermakna secara statistik antara tingkat motivasi dan kepatuhan membayar iuran dalam studi ini.

Hasil Analisis Multivariat

Analisis multivariat digunakan untuk mengidentifikasi variabel yang paling berpengaruh terhadap kepatuhan membayar iuran oleh peserta pekerja bukan penerima upah di Kota Jakarta. Proses analisis ini dilakukan melalui uji regresi logistik berganda (*multiple logistic regression*), yang mencakup tahapan pemilihan variabel kandidat untuk model prediksi serta penyusunan model analisis multivariat.

a. Pemilihan Kandidat Model

Sebelum dilakukan analisis multivariat, terlebih dahulu dilakukan analisis bivariat antara setiap variabel independen dengan variabel dependen. Tujuannya adalah untuk

mengidentifikasi variabel-variabel yang layak dijadikan kandidat dalam pemodelan multivariat. Variabel yang memiliki nilai probabilitas (*p-value*) kurang dari 0,25 pada analisis bivariat akan dipertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam model multivariat, sedangkan variabel dengan *p-value* $\geq 0,25$ tidak disertakan. Hasil analisis bivariat antara variabel independen dan dependen disajikan sebagai dasar pemilihan kandidat (Dr. Rr. Nur Fauziyah, SKM, MKM, 2019). Hasil analisis bivariat antara dua variabel independen dan variabel dependen dapat dilihat pada tabel 6.23 di bawah ini.

Tabel 9. Hasil Analisis Bivariat Variabel Independen dengan Variabel Dependen.

No.	Variabel	<i>P-value</i>	Keterangan
1.	Pengetahuan	0,48	Tidak
2.	Sanksi	0,59	Tidak
3.	Motivasi	0,12	Kandidat
4.	Persepsi	0,00	Kandidat
5.	Jumlah Anggota Keluarga	0,54	Tidak
6.	Pekerjaan	0,02	Kandidat
7.	Pendidikan	0,32	Tidak
8.	Tarif Iuran	0,11	Kandidat
9.	Akses Pembayaran	0,22	Kandidat
10.	Pendapatan	0,10	Kandidat

Berdasarkan hasil analisis awal, pemilihan variabel kandidat untuk dimasukkan ke dalam pemodelan multivariat dilakukan dengan menggunakan batas nilai *p-value* $\leq 0,25$. Dari sepuluh variabel yang dianalisis, terdapat enam variabel yang memenuhi kriteria tersebut, yaitu motivasi ($p = 0,12$), persepsi ($p = 0,00$), pekerjaan ($p = 0,02$), tarif iuran ($p = 0,11$), akses pembayaran ($p = 0,22$), dan pendapatan ($p = 0,10$). Keenam variabel ini dianggap sebagai kandidat karena meskipun belum tentu signifikan secara statistik dalam uji bivariat, masih memiliki potensi hubungan yang bermakna setelah dikontrol bersama variabel lain dalam model multivariat. Sementara itu, empat variabel lainnya, yaitu pengetahuan ($p = 0,48$), sanksi ($p = 0,59$), jumlah anggota keluarga ($p = 0,54$), dan pendidikan ($p = 0,32$), tidak dimasukkan sebagai kandidat karena nilai *p*-nya melebihi batas yang ditetapkan. Dengan demikian, keenam variabel kandidat akan digunakan dalam tahap analisis selanjutnya untuk melihat faktor-faktor yang secara signifikan memengaruhi kepatuhan membayar iuran JKN.

Sebelum dilanjutkan ke tahap pemodelan, dilakukan terlebih tes omnibus yang berfungsi untuk mengevaluasi apakah model regresi logistic yang dibuat secara keseluruhan signifikan, apakah model dengan variabel prediktor (independen) lebih baik dalam

memprediksi variabel dependen dibandingkan dengan model kosong atau tanpa prediktor (independent). Hasil omnibus test dapat dilihat pada table di bawah ini.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di Kota Jakarta tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional oleh Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah, maka kesimpulan nya sebagai berikut :

1. Tingkat kepatuhan membayar iuran JKN oleh peserta PBPU di Kota Jakarta masih tergolong rendah, dengan sebagian besar responden tidak membayar iuran tepat waktu, Dari 10 variabel bebas yang diteliti, hanya variabel persepsi dan pekerjaan saja yang terdapat hubungan signifikan terhadap kepatuhan membayar iuran.
2. Pada penelitian ini mayoritas responden adalah perempuan dan berada dalam rentang usia produktif, khususnya usia 36-45 tahun dan 26-35 tahun . Sebagian besar responden berpendidikan tamat SMA dan bekerja di sektor informal, terutama sebagai pedagang atau wiraswasta serta tenaga ahli atau pekerja bebas. Dari sisi jumlah anggota keluarga, mayoritas responden berasal dari keluarga kecil dengan 3-4 anggota keluarga. Temuan ini menunjukkan bahwa responden didominasi oleh kelompok usia produktif, berpendidikan menengah, bekerja secara mandiri, dan berasal dari keluarga inti, yang secara keseluruhan mencerminkan potensi partisipatif dalam program kesehatan berbasis masyarakat.
3. Persepsi merupakan faktor yang paling dominan memengaruhi kepatuhan membayar iuran JKN. Responden dengan persepsi positif memiliki kemungkinan hampir lima kali lebih besar untuk patuh dibandingkan dengan yang berpersepsi negatif.
4. Variabel lain seperti pendapatan, akses pembayaran, pengetahuan, sanksi, pendidikan, jumlah anggota keluarga, dan tarif iuran tidak menunjukkan hubungan yang signifikan, meskipun secara deskriptif memiliki peran pendukung dalam kepatuhan. Hasil ini menguatkan konsep dalam teori Lawrence Green bahwa faktor pendorong (*reinforcing factors*) seperti persepsi dan motivasi berperan penting dalam membentuk perilaku kepatuhan.

DAFTAR REFERENSI

- Adebayo, E. F., Uthman, O. A., Wiysonge, C. S., Stern, E. A., Lamont, K. T., & Ataguba, J. E. (2021). A systematic review of factors that affect uptake of community-based health insurance in low-income and middle-income countries. *BMC Health Services Research*, 15(1). <https://doi.org/10.1186/s12913-015-1179-3>
- Adolph, R. (2020). *Peraturan BPJS Kesehatan*. 1–23.

- Ainy, A., Idris, H., Inaku, H., & Tembo, T. (2024). Perceptions and Their Correlation With Enrollment in the Indonesian National Health Insurance Scheme. *Indonesian Journal of Health Administration*, 12(2), 218–227. <https://doi.org/10.20473/jaki.v12i2.2024.218-227>
- Al Imron, I., Sutaip, & Abdurochman. (2023). Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Membayar Iuran Bpjs Kesehatan Mandiri. *Journal of Midwifery and Health Administration Research*, 3(2), 2023.
- Alfianto, H. (2024). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Dinas Perhubungan Kota Cilegon). *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 1(1), 41–54. <https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i1.90>
- Alkayyis, M. Y. (2024). *Implementation of the National Health Insurance Programme in Achieving Universal Health Coverage in Indonesia*. 4(2), 85–95.
- Annastasyia Mukrimah Yusuf, Ma'ruf Hafidz, H. K. (2024). Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Fasilitas Kesehatan Dalam Mengikutsertakan Pekerjaannya Pada Program Jaminan Kesehatan Nasional. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(1), 260–275.
- APRILIANTI, E. (2022). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Membayar Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kategori Mandiri Di Kecamatan Kayuagung. *Skripsi*, 1–34.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta (Jiwa)*. <https://jakarta.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTI3MCMY/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-dki-jakarta-html>
- Besse Wahyuni, Nurgahayu, & Haeruddin. (2022). Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Mengikuti Program Jaminan Kesehatan Nasional. *Window of Public Health Journal*, 3(1), 157–168. <https://doi.org/10.33096/woph.v3i1.357>
- Boateng, D., & Awunyor-Vitor, D. (2021). Health insurance in Ghana: Evaluation of policy holders' perceptions and factors influencing policy renewal in the Volta region. *International Journal for Equity in Health*, 12(1), 1–10. <https://doi.org/10.1186/1475-9276-12-50>
- BPJS Kesehatan. (2025). *Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial Kesehatan*. <https://www.bpjs-kesehatan.go.id/#/>
- Budiman, Y., & Ciptono, W. S. (2018). *Analisis Kepatuhan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional*. 19(1).
- Cecilie Lindström Egholm. (2018). *Implementation of a politically initiated national clinical guideline for cardiac rehabilitation in hospitals and municipalities in Denmark*. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S016885101830277X?via%3DiHub>
- Citra Dewiyani & Rizki Fadila. (2022). *Determinant Factors of Compliance Paying Jkn Contribution To*. 8(1), 1–10.
- Dewan Jaminan Sosial Nasional. (2025). *Jumlah Kepesertaan BPJS Kesehatan DKI Jakarta*. <https://kesehatan.djsn.go.id/kesehatan/cakupan/>
- Dewiyani, A. C., & Fadila, R. (2022). Faktor Determinan Kepatuhan Membayar Iuran JKN pada Peserta Mandiri di Kota Malang. *Jurnal Informasi Kesehatan Indonesia*, 8(1), 1–10.

- Dr. Rr. Nur Fauziyah, SKM, MKM, R. (2019). Analisis Data Menggunakan Multiple Logistic Regression Test di Bidang Kesehatan Masyarakat dan Klinis. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Dworsky, M. S., Eibner, C., Nie, X., & Wenger, J. B. (2022). The effect of the minimum wage on employer-sponsored insurance for low-income workers and dependents. *American Journal of Health Economics*, 8(1), 99–126. <https://doi.org/10.1086/716198>
- Fadhilla, A., & Novira, N. (2024). Tingkat Kepatuhan Masyarakat dalam Pendaftaran Data Kependudukan di Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan. *Jurnal Spatial Wahana Komunikasi Dan Informasi Geografi*, 24(1), 72–84. <https://doi.org/10.21009/spatial.241.008>
- Fajrini, F., A. N. L., Herdiansyah, D., & ... (2021). Studi Ketidakpatuhan Membayar Iuran BPJS Kesehatan Peserta Non PBI Bukan Penerima Upah di Kelurahan Cempaka Putih Tahun 2018. ... *Public Health Journal*. <http://repository.umj.ac.id/id/eprint/5258>
- Haizumah, S. F., & Hayati, N. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kewajiban Moral, dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Pamekasan. *Equity: Jurnal Akuntansi*, 3(1), 17–29. <https://doi.org/10.46821/equity.v3i1.284>
- Hapsari, M. S., & Pujilestari, A. (2024). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Peserta Non PBI di Kecamatan Tasikmadu The Factors That Influence Compliance With BPJS Kesehatan Contribution Payments For Non PBI Participants In Tasikmadu Subdistrict*. 7(2), 44–51.
- Hidayah, M., & Nurmansyah, M. I. (2021). Analysis of Factors Affecting Intention to Pay National Health Insurance Premium among Informal Workers in Depok City. *Journal of Religion and Public Health*, 3(1), 1–8.
- Kania Rizqita Dewi, Putri Regita Miolda, Triayu Nur Afifah, & Novita Dwi Istanti. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Di Indonesia : Literature Review. *Jurnal Ventilator*, 1(2), 50–64. <https://doi.org/10.59680/ventilator.v1i2.301>
- Kementerian Kesehatan RI. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023*.
- Khairunnisa Assyarifiyah. (2023). *Faktor yang berhubungan dengan kepatuhan membayar iuran bpjs non pbi pada pasien rawat jalan di rsup dr. tadjuddin cholid makassar*.
- Kimani, J. K., Ettarh, R., Warren, C., & Bellows, B. (2014). Determinants of health insurance ownership among women in Kenya: Evidence from the 2008-09 Kenya demographic and health survey. *International Journal for Equity in Health*, 13(1), 1–8. <https://doi.org/10.1186/1475-9276-13-27>
- Laksono, A. D., Wulandari, R. D., Zuardin, Z., & Rohmah, N. (2024). Education'S Role in Primary Healthcare Utilization Among Older People in Indonesia. *Indonesian Journal of Health Administration*, 12(1), 11–24. <https://doi.org/10.20473/JAKI.V12I1.2024.11-24>
- Lawrence W. Green. (1991). *Health Promotion Palnning*.

https://openlibrary.org/books/OL1862780M/Health_promotion_planning?utm_source=chatgpt.com#overview

- Lisnah, Arifuddin, & Nohong, M. (2023). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Membayar Iuran pada Peserta BPJS Kesehatan Mandiri di Kota Jayapura. *Jurnal Mirai Management*, 8(3), 234–245.
- M, R. F., Sety, L. O. M., & Hartoyo, A. M. (2024). Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Membayar Iuran Bpjs Oleh Peserta Bpjs Mandiri Di Puskesmas Ranomeeto KECAMATAN RANOMEETO TAHUN 2023. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan (Jakk-Uho)*, 5(2), 238–247. <http://jakp.fisip.unand.ac.id/index.php/jakp/article/view/139>
- Marpaung, F. V., Nyorong, M., & Moriza, T. (2022). Factors Affecting the Compliance of National Health Insurance Participants Segment of Non-Wage Recipients in Paying the Contributions. *Journal La Medihealtico*, 3(3), 171–179. <https://doi.org/10.37899/journallamedihealtico.v3i3.656>
- Masriadi, H., Baharuddin, A., & Samsualam. (2021). *Metodologi Penelitian kesehatan kedokteran dan keperawatan*. CV Trans Info Media.
- Masturoh, I., & T, N. A. (2018). Metodologi Penelitian Kesehatan. In: Metodologi Penelitian Kesehatan. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Issue November, pp. 1–308). http://bppsdmk.kemkes.go.id/pusdiksdmk/wp-content/uploads/2018/09/Metodologi-Penelitian-Kesehatan_SC.pdf
- Mekarisce, A. A., Noerjoedianto, D., & Solida, A. (2022). Hubungan sosio demografi dan pendapatan dengan kepatuhan membayar iuran PBPU pekerja mandiri di BPJS kesehatan KC Jambi. *Riset Informasi Kesehatan*, 11(1), 13. <https://doi.org/10.30644/rik.v11i1.548>
- Muhlis, A. N. A. (2022). Determinants of the National Health Insurance Uptake in Indonesia. *Indonesian Journal of Health Administration*, 10(1), 111–121. <https://doi.org/10.20473/jaki.v10i1.2022.111-121>
- Multazam, A. M., Dindha, A., Ramadhani, B., & Idris, F. P. (2024). Analisis Kepatuhan Pembayaran Iuran Peserta BPJS Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dalam Pemanfaatan Layanan Kesehatan di Kelurahan Bosso Tahun 2023. *Journal Of Aafiyah Health Research (JARH)*, 5(2), 191–198.
- Mulyani, S. (2021). *The Relationship Between Income And Access With Payment Regulations Of Health Insurance For Self-Financing Members In Puuwatu Primary Health Care Centre In Kendari City*. <https://ijhsrd.com/index.php/ijhsrd/article/view/17>
- Murniasih, M., Suparman, R., Mamlukah, M., & Febriani, E. (2022). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Pembayaran Iuran Bpjs Kesehatan Pada Peserta Mandiri Di Puskesmas Kertasemaya Kabupaten Indramayu Tahun 2022. *Journal of Public Health Innovation*, 3(01), 41–51. <https://doi.org/10.34305/jphi.v3i01.604>
- Muslimah, I. R. (2021). Kepemimpinan Perempuan dalam Mengembangkan Budaya Organisasi. *Jurnal Kependidikan Islam*, 11(2), 198–207. <https://doi.org/10.15642/jkpi.2021.11.2.198-207>
- Nada Muhizra. (2021). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dalam Membayar Iuran Di RSUD Kotapinang. *Pharmacognosy Magazine*, 75(17), 399–405.

- Natasia Tri Utami, Christian Wiradendi Wolor, & Marsofiyati Marsofiyati. (2023). Analisis Kepatuhan Kerja Anggota di Polsek Pademangan. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 3(1), 70–82. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v3i1.2267>
- Nawirah Hasan, A. S. B. (2020). *Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Membayar Iuran BPJS Pada Peserta Mandiri di Puskesmas Tamamaung*. 01(04), 382–393.
- Notoatmodjo. (2012). *Pdf-Metodologi-Penelitian-Kesehatan-Notoatmodjo_Compress.Pdf* (p. 243).
- Nugroho, I. H., Dewi, A., & Nazaruddin, I. (2021). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar JKN Pada Pekerja Informal Di Kulon Progo. *Jurnal Manajemen Kesehatan Yayasan RS.Dr. Soetomo*, 7(1), 59. <https://doi.org/10.29241/jmk.v7i1.595>
- Nur Aisyah Malik. (2021). Kepatuhan Peserta Bpjs Kesehatan Mandiri Membayar Iuran Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Wilayah Kerja Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa Tahun 2021. *Pharmacognosy Magazine*, 75(17), 399–405.
- Nur Aziza Ramadani, Haeruddin, & Andi Surahman Batara. (2021). Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Membayar Iuran BPJS pada Peserta Mandiri. *Window of Public Health Journal*, 2(2), 203–213. <https://doi.org/10.33096/woph.v2i2.138>
- Nuraeni, N. (2021). Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Iuran Peserta Bpjs Mandiri Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar. *Thesis, Universitas Hasanuddin*.
- Nurjannah Siti, Batara Surahman, & Haeruddin. (2021). Faktor Yang Berhubungan dengan Kepatuhan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Mandiri di Kelurahan Bontomanai Kabupaten Gowa. *Window of Public Health Journal*, 2(5), 765–773.
- Peraturan Presiden. (2020). Jaminan Kesehatan. *Jdih BPK RI*, 64, 12. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/136650/perpres-no-64-tahun-2020>
- Perpres RI No. 82 Tahun 2018. (n.d.). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/94711/perpres-no-82-tahun-2018>
- Purwanza, S. W., Wardhana, A., Mufidah, A., Renggo, Y. R., Hudang, A. K., Setiawan, J., & Darwin. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi. In *Media Sains Indonesia* (Issue March).
- Putra, A. E., & Pujiyanto. (2024). Analysis of Factors Influencing BPJS Membership Status in the Independent (PBPU) and Non-Worker Segments. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)*, 7(6), 1686–1694. <https://doi.org/10.56338/mppki.v7i6.5221>
- Ramdaniati, S. (2021). Analisis Gaya Kepemimpinan Otoriter dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Retribusi Pasar Sentral Sengkang Kabupaten Wajo. *Jurnal Ada Na Gau: Public Administration*, 2(2), 781–790. <http://ojs.lppmuniprima.org/index.php/jangpa/article/view/238>
- Rika Widianita, D. (2023a). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Membayar Iuran Bulanan Bpjs Kesehatan Peserta Mandiri Pada Sektor Informal Di Kota JAMBI. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, VIII(I), 1–19.
- Rika Widianita, D. (2023b). Kepatuhan Membayar Iuran Peserta Mandiri BPJS Kesehatan di Kecamatan Selebar. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, VIII(I), 1–19.
- Rosdiana, H., Nurmawaty, D., Heryana, A., & Irfandi, A. (2023). Faktor – Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Membayar Iuran Bpjs Kesehatan Oleh Peserta Mandiri Pada Unit Rawat Jalan Puskesmas Kecamatan Kalideres Tahun 2023. *Jurnal*

Kesehatan Dan Kedokteran, 2(2), 38–43. <https://doi.org/10.56127/jukeke.v2i2.899>

- Saimi, S., Khaliq, A., & Atmaja, I. N. D. J. (2023). The Influence of Motivation, Knowledge, and Ability to Pay on Compliance in Paying Premiums for Self-Participants in the National Health Insurance Program in West Lombok Regency. *Prisma Sains : Jurnal Pengkajian Ilmu Dan Pembelajaran Matematika Dan IPA IKIP Mataram*, 11(4), 982. <https://doi.org/10.33394/j-ps.v11i4.9131>
- Sartika, V., & Putra, Z. (2024). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Peserta Mandiri Terhadap Pembayaran Iuran JKN di Aceh Selatan. *Maret*, 2(3), 1420–1433. <https://journal.institercom-edu.org/index.php/multiple>
- Sawong, K. S. A., Andrias, D. R., Muniroh, L., Reddy, C., Purnawita, W., Rahayu, W. P., Nurjanah, S., & RI, K. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011. *Экономика Региона*, 53(9), 167–169.
- Sekretaris Negara RI. (2004). UU RI No.40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. *Jdih BPK RI*, 1–45.
- Semaun, S., & Juneda, J. (2018). Sistem Pengelolaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Mandiri Kota Parepare. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 16(2), 284–306. <https://doi.org/10.35905/diktum.v16i2.622>
- Sinaga, E. S., Ika Rahma Ginting, Kusumaratna, R. K., & Marthias, T. (2021). Evaluasi Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Di Provinsi DKI Jakarta, Indonesia. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI*, 10(03), 1–9.
- Sunjaya, D. K., Herawati, D. M. D., Sihalohe, E. D., Hardiawan, D., Relaksana, R., & Siregar, A. Y. M. (2022a). Factors Affecting Payment Compliance of the Indonesia National Health Insurance Participants. *Risk Management and Healthcare Policy*, 15(February), 277–288. <https://doi.org/10.2147/RMHP.S347823>
- Sunjaya, D. K., Herawati, D. M. D., Sihalohe, E. D., Hardiawan, D., Relaksana, R., & Siregar, A. Y. M. (2022b). Factors Affecting Payment Compliance of the Indonesia National Health Insurance Participants. *Risk Management and Healthcare Policy*, 15, 277–288. <https://doi.org/10.2147/RMHP.S347823>
- Syahda, S., Lubis, E. M., Atika, R., & Gurning, F. P. (2022). Hubungan Pengetahuan dengan Keikutsertaan Masyarakat dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, 1(9), 1278–1285.
- Syapitri, H., Amila, & Aritonang, J. (2021). *Buku Ajar Metodologi Penelitian Kesehatan* (A. H. Nadana (Ed.); 1st ed.).
- Tampubolon, H. J., Tucunan, A. A. T., & Kolibu, F. K. (2023). Determinan Kepatuhan Membayar Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Pada Peserta Mandiri Di Kelurahan Malalayang Satu Kota Manado. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 4(4), 4787–4795. <https://doi.org/10.31004/jkt.v4i4.15957>
- Trisnasari, Laosee, O., Rattanapan, C., & Janmaimool, P. (2023). Assessing the Determinants of Compliance with Contribution Payments to the National Health Insurance Scheme among Informal Workers in Indonesia †. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(23). <https://doi.org/10.3390/ijerph20237130>
- Tsuroyya, S. L., & Maharani, C. (2023). Systematic Literature Review: Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Peserta PBU dalam Membayar Iuran JKN. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 12(4), 193. <https://doi.org/10.22146/jkki.87944>

- Utami, N. J., Karyus, A., & Pramudho, K. (2024). Kepatuhan Peserta PBPU dalam Membayar Iuran BPJS Kesehatan di Kabupaten Mesuji. *Jik Jurnal Ilmu Kesehatan*, 8(1), 10. <https://doi.org/10.33757/jik.v8i1.760>
- Wibowo, A. (2021). *Metodologi Penelitian Praktis Bidang Kesehatan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Wichsy. (2023). *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Tingkat Kepatuhan Membayar Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (Jkn) Pekerja Bukan Penerima Upah (Pbpu) Di Kota Jambi Tahun 2023*. 1–23.
- Wulandari, A., Syah, N. A., & Ernawati, T. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Peserta Mandiri Dalam Pembayaran Iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Solok. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 9(1), 7. <https://doi.org/10.25077/jka.v9i1.1219>
- Wulandari, R. D., Laksono, A. D., Tumaji, T., Herawati, M. H., Pracoyo, N. E., & Kusriani, I. (2024). Membership in National Health Insurance Among Workers in Indonesia. *Indonesian Journal of Health Administration*, 12(2), 280–291. <https://doi.org/10.20473/jaki.v12i2.2024.280-291>
- Zomahoun, H. T. V., Guénette, L., Grégoire, J. P., Lauzier, S., Lawani, A. M., Ferdynus, C., Huiart, L., & Moisan, J. (2021). Effectiveness of motivational interviewing interventions on medication adherence in adults with chronic diseases: A systematic review and meta-analysis. *International Journal of Epidemiology*, 46(2), 589–602. <https://doi.org/10.1093/ije/dy>